

PILKADA DI MALUKU

Pilkada Serentak Tahun 2017 di Provinsi Maluku diselenggarakan di lima kabupaten/kota yakni di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Tengah. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pencairan anggaran pengawasan di lima kabupaten/kota tersebut dilaksanakan tepat waktu. Untuk Kota Ambon, dari Rp8.138.242.000,00 yang diajukan, yang disetujui sebesar Rp 6.713.556.000,00. Anggaran pengawasan Kabupaten Seram Bagian Barat disetujui Rp 8.500.000.000,00 dari Rp 9.472.400.000,00 yang diajukan. Di Kabupaten Buru, dari Rp 8.218.352.000,00 yang diajukan, disetujui Rp 6.000.000.000,00 anggaran yang disetujui di Kabupaten Maluku Tenggara Barat lebih besar dibanding nilai yang diajukan. Anggaran yang disetujui sebesar Rp8.704.182.200,00 dari Rp7.622.284.000,00 yang diajukan. Sementara itu, di Kabupaten Maluku Tengah, dari Rp 14.858.084.000,00 yang diajukan, disetujui sebanyak Rp10.924.704.000.

Jumlah pengawas yang ditugaskan dalam pilkada di Kota Ambon sebanyak 760 orang yang terdiri dari 505 laki-laki dan 255 perempuan. Sedangkan, pengawas yang tersebar di Kabupaten Seram Bagian Barat berjumlah 489 orang yang terdiri dari 392 laki-laki dan 97 perempuan. Begitu pula, di Kabupaten Buru terdapat 374 pengawas yang terdiri dari 320 personel laki-laki dan 54 personel perempuan. Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat tercatat 296 pengawas yang meliputi 245 laki-laki dan 51 perempuan. Sementara, di Kabupaten Maluku Tengah terdapat 581 pengawas laki-laki dan 159 pengawas perempuan.

Hasil pengawasan pada tahapan kampanye di Kota Ambon, terdapat dua dugaan mobilisasi PNS, satu dugaan kampanye hitam dan satu dugaan politik uang. Di Seram Bagian Barat terdapat satu pelanggaran terkait isu SARA, tiga dugaan mobilisasi PNS, dan satu dugaan kampanye hitam. Di Kabupaten Buru ditemukan lima dugaan

mobilisasi PNS dan tiga dugaan kampanye hitam. Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat satu dugaan mobilisasi PNS, satu dugaan kampanye hitam dan 11 dugaan politik uang. Di Kabupaten Maluku Tengah ditemukan satu dugaan pelanggaran terkait penggunaan fasilitas negara dan satu dugaan mobilisasi PNS.

Pada tahapan pemungutan suara, di Kota Ambon ditemukan 28.489 formulir C6 yang tidak terdistribusikan. Di Kabupaten Buru sebanyak 7.228 formulir C6 dan di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 530 formulir C6 yang tidak terdistribusi. Pelanggaran pada proses pemungutan suara ditemukan sebanyak lima kasus di Kabupaten Seram Bagian Barat, lima di Kabupaten Buru, empat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan satu kasus di Kabupaten Maluku Tengah. Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas rekomendasi panwas dilakukan di lima TPS.

Terkait sengketa, pada tahapan pencalonan terdapat satu sengketa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan dua sengketa di Kabupaten Maluku Tengah. Sementara sengketa hasil terdapat di Kabupaten Buru sebanyak satu sengketa, dua sengketa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan satu sengketa hasil di Kabupaten Maluku Tengah. Secara keseluruhan, di Kota Ambon terdapat 41 pelanggaran administrasi dan enam pelanggaran pidana. Di Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat 12 pelanggaran administrasi, tiga pelanggaran pidana dan satu pelanggaran etik. Di Kabupaten Buru terdapat 29 pelanggaran administrasi, sembilan pelanggaran pidana dan satu pelanggaran etik. Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat lima pelanggaran administrasi, 22 pelanggaran pidana dan satu pelanggaran etik. Di Kabupaten Maluku Tengah, terdapat sebanyak sembilan pelanggaran administrasi dan satu pelanggaran pidana.



PROVINSI MALUKU

Kota Ambon



DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	114.349
	Perempuan	123.278
DPTb	Laki-laki	2.546
	Perempuan	3.073
DPPh	Laki-laki	185
	Perempuan	123

Jumlah Pemilih Pemula	7.805
Jumlah Pemilih Disabilitas	115
Jumlah Pemilih TMS	25.412



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	2	0	2	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				2			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 8.138.242.000,-

Yang Disetujui

Rp 6.713.556.000,-

Ketepatan Waktu

tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
68.463	78.781	2.543	3.028	151	117	71.157	81.926	151.583	1.500	110	65,10%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	28.489
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	2
Kampanye Jahat (Hitam)	1
Politik Uang	1
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			3	0	15	0	169	51	318	204



Pencalonan (Tahapan)	0
SENGKETA	
Hasil	0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	41	Pelanggaran Pidana	6	Pelanggaran Etik	0	Pelanggaran Hukum Lainnya	0
--------------------------	----	--------------------	---	------------------	---	---------------------------	---



PROVINSI MALUKU

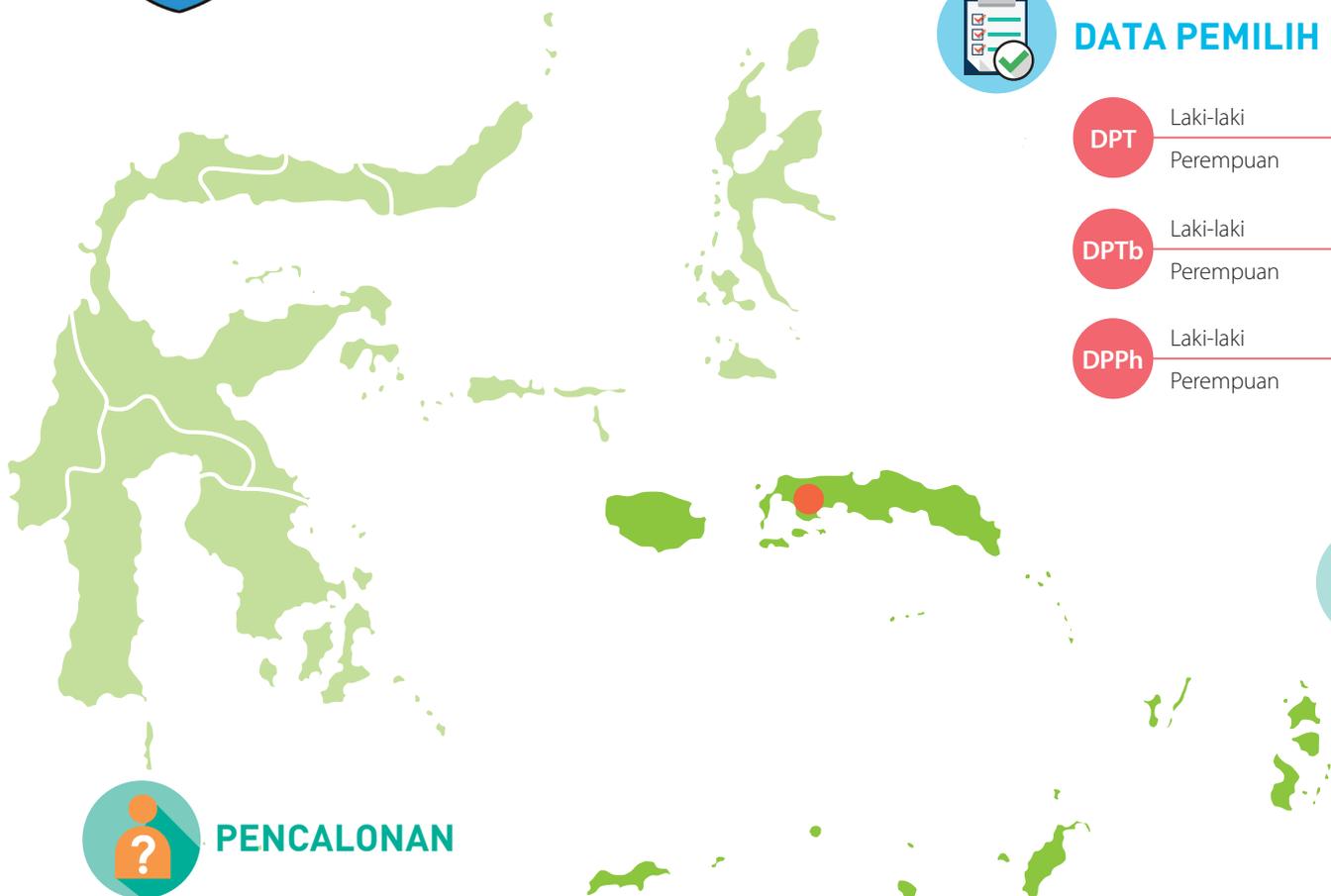
Kabupaten Seram Bagian Barat



DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	73.754
	Perempuan	73.768
DPTb	Laki-laki	1.305
	Perempuan	1.417
DPPh	Laki-laki	111
	Perempuan	41

Jumlah Pemilih Pemula	6.255
Jumlah Pemilih Disabilitas	213
Jumlah Pemilih TMS	21.751



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
4	0	4	0	4	0	0	0

Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS

Jumlah Paslon Petahana

0



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 9.472.400.000,-

Yang Disetujui

Rp 8.500.000.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
53.905	53.993	1.299	1.408	111	41	55.315	55.442	109.810	947	209	74,40%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	5

Pemungutan Suara Ulang	
Rekomendasi Panwas	Putusan MK
5	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	1
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	3
Kampanye Jahat (Hitam)	1
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			3	0	31	2	75	17	283	78



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 12

Pelanggaran Pidana 3

Pelanggaran Etik 1

Pelanggaran Hukum Lainnya 0



PROVINSI MALUKU

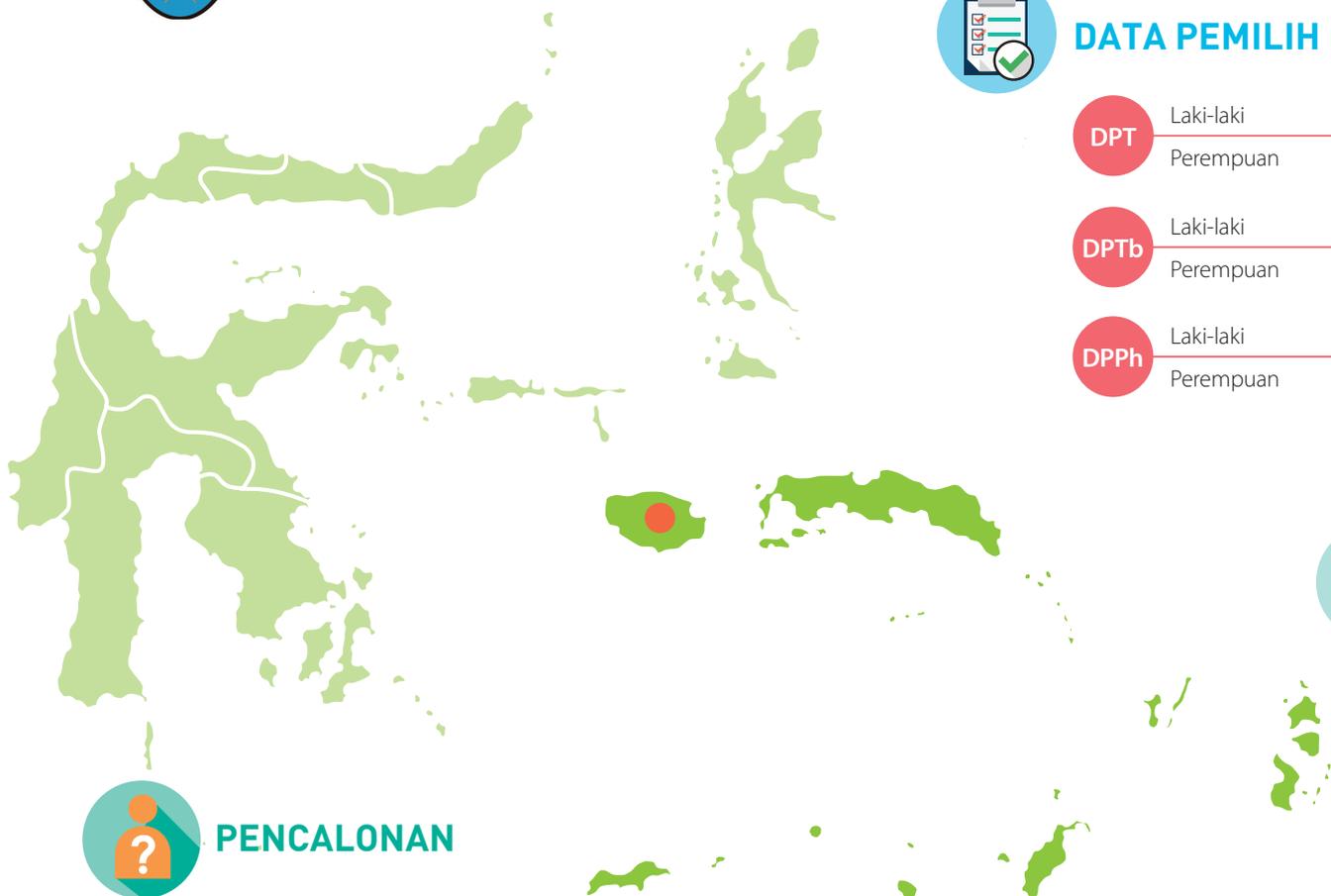
Kabupaten Buru



DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	47.360
	Perempuan	46.768
DPTb	Laki-laki	3.019
	Perempuan	3.109
DPPh	Laki-laki	163
	Perempuan	86

Jumlah Pemilih Pemula	3.320
Jumlah Pemilih Disabilitas	89
Jumlah Pemilih TMS	11.724



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	2	0	2	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				1			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 8.218.352.000,-

Yang Disetujui

Rp 6.000.000.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
32.987	31.932	3.010	3.089	151	72	36.148	35.093	70.694	547	88	75,90%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	7.228
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	5



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	5
Kampanye Jahat (Hitam)	3
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			2	1	29	1	74	8	215	44



Pencalonan (Tahapan)	0
SENGKETA	
Hasil	1





PROVINSI MALUKU

Kabupaten Maluku Tenggara Barat



DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	35.025
	Perempuan	37.066
DPTb	Laki-laki	1.208
	Perempuan	1.626
DPPh	Laki-laki	
	Perempuan	42

Jumlah Pemilih Pemula	2.529
Jumlah Pemilih Disabilitas	376
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
3	0	3	0	3	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
1				1			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 7.622.284.000,-

Yang Disetujui

Rp 8.704.182.200,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
25.852	27.269	1.203	1.624	124	42	27.179	28.935	55.498	616	372	73,50%



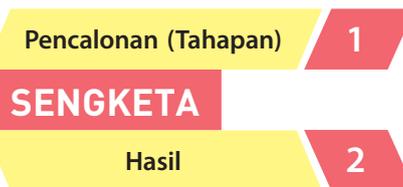
Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	4



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	1
Kampanye Jahat (Hitam)	1
Politik Uang	11
Kampanye Masa Tenang	0

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			3	0	28	2	67	11	147	38





PROVINSI MALUKU

Kabupaten Maluku Tengah



DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	152.973
	Perempuan	158.163
DPTb	Laki-laki	1.550
	Perempuan	1.807
DPPh	Laki-laki	589
	Perempuan	465

Jumlah Pemilih Pemula	10.108
Jumlah Pemilih Disabilitas	113
Jumlah Pemilih TMS	37.833



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
1	0	1	0	1	0	0	1
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
2				1			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 14.858.084.000,-

Yang Disetujui

Rp 10.924.704.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
101.540	105.976	1.493	1.766	587	462	103.620	108.204	209.031	2.793	102	68,40%



PEMUNGUTAN SUARA

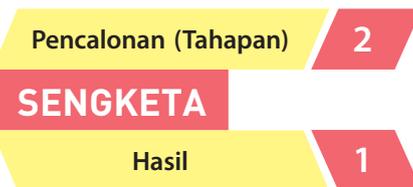
Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	530
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	1



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	1
Mobilisasi PNS	1
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			2	1	46	7	238	39	295	112



PELANGGARAN



PILKADA DI MALUKU UTARA

Pada Pilkada serentak tahun 2017, di Provinsi Maluku Utara diselenggarakan pemilihan bupati di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah. Anggaran pengawasan yang diajukan untuk Pilkada di Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 3.949.625.000,00 dan disetujui sebesar Rp 3.799.625.000,00. Sementara itu, di Kabupaten Halmahera Tengah anggaran pengawasan yang diterima oleh Kabupaten Halmahera Tengah sama dengan jumlah anggaran yang diajukan, yaitu sebesar Rp 4,5 miliar. Anggaran di kedua kabupaten tersebut berhasil dicairkan tepat waktu. Jumlah personel pengawas di Kabupaten Pulau Morotai adalah 116 pengawas yang terdiri dari 115 laki-laki dan satu perempuan. Sedangkan di Kabupaten Di Halmahera Tengah, jumlah personil pengawas adalah 127 orang laki-laki.

Di Pulau Morotai terdapat lima dugaan pelanggaran terkait dengan isu SARA, empat dugaan pelanggaran terkait penggunaan fasilitas negara, tujuh dugaan pelanggaran Mobilisasi PNS, tiga dugaan pelanggaran kampanye jahat (Hitam), 23 dugaan politik uang, dan tiga dugaan pelanggaran terkait kegiatan kampanye di masa tenang. Proses penanganan dugaan pelanggaran oleh pengawas pemilu di Kabupaten Pulau Morotai telah menghasilkan 14 penindakan pelanggaran administrasi, 33 Pelanggaran Pidana, satu pelanggaran etik, dua Poelanggaran Hukum Lainnya. Sementara itu, di Kabupaten Halmahera Tengah terdapat dua kasus dugaan pelanggaran terkait dengan isu sara, dua dugaan pelanggaran terkait penggunaan fasilitas negara, lima dugaan mobilisasi PNS, empat dugaan Kampanye Jahat (Hitam), lima dugaan politik uang, dan empat dugaan kegiatan kampanye yang dilakukan di masa tenang. Proses penanganan dugaan pelanggaran oleh pengawas pemilu di Kabupaten Pulau Morotai menghasilkan tiga pelanggaran administrasi, 13 pelanggaran pidana, dua pelanggaran etik, dan satu pelanggaran hukum lainnya.



PROVINSI MALUKU UTARA

Kabupaten Pulau Morotai



DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	24.010
	Perempuan	22.643
DPTb	Laki-laki	1.146
	Perempuan	1.252
DPPh	Laki-laki	78
	Perempuan	51

Jumlah Pemilih Pemula	1.784
Jumlah Pemilih Disabilitas	78
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
3	0	2	1	2	1	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				0			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 3.949.625.000,-

Yang Disetujui

Rp 3.799.625.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
18.653	17.412	1.143	1.242	78	51	19.874	18.705	38.334	245	73	78,90%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	3



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	5
Penggunaan Fasilitas Negara	4
Mobilisasi PNS	7
Kampanye Jahat (Hitam)	3
Politik Uang	23
Kampanye Masa Tenang	3

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			2	1	15	0	78	0	20	0



Pencalonan (Tahapan)	0
SENGKETA	
Hasil	0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	14	Pelanggaran Pidana	33	Pelanggaran Etik	1	Pelanggaran Hukum Lainnya	2
--------------------------	----	--------------------	----	------------------	---	---------------------------	---



PROVINSI MALUKU UTARA

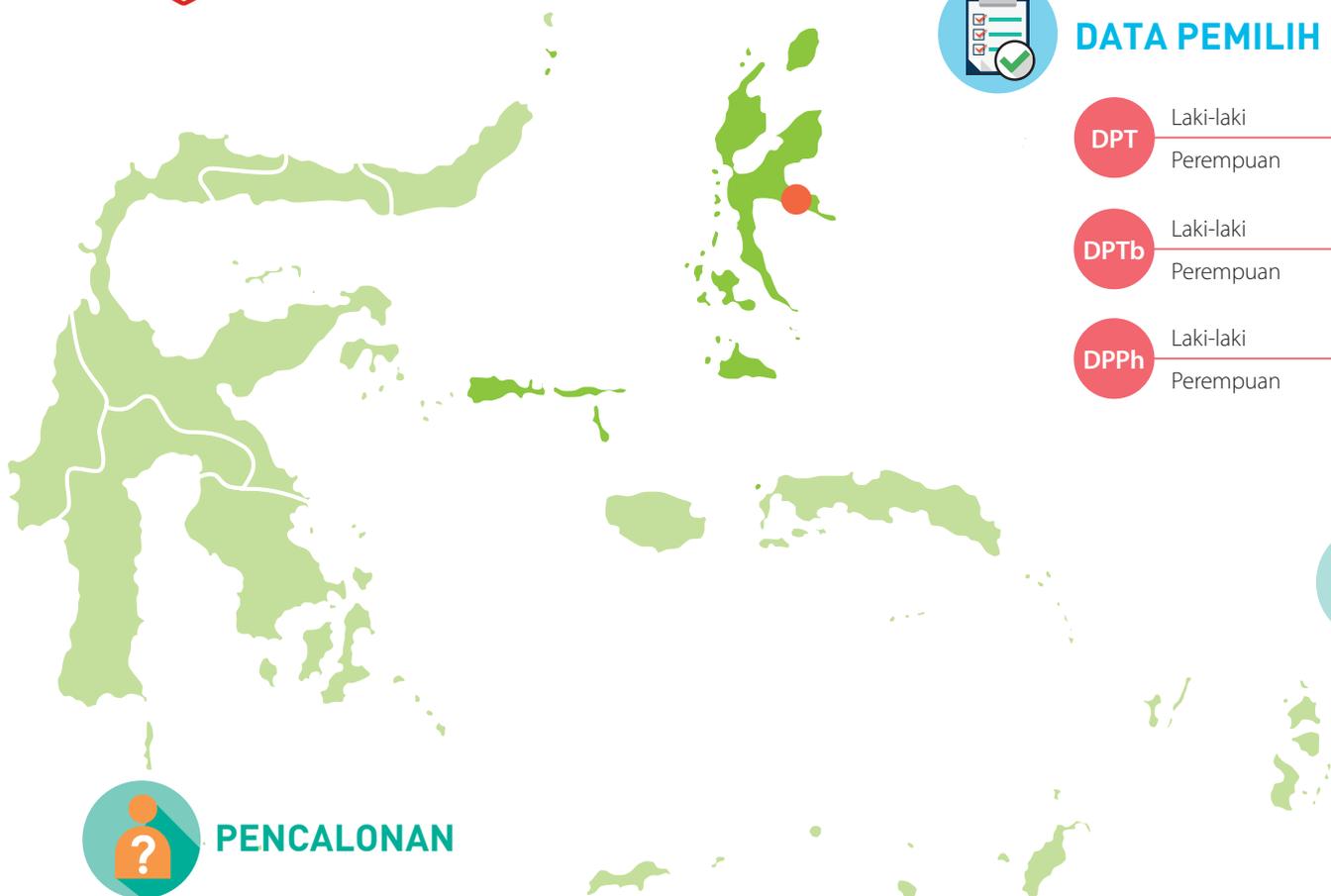
Kabupaten Halmahera Tengah



DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	16.937
	Perempuan	16.251
DPTb	Laki-laki	474
	Perempuan	516
DPPh	Laki-laki	211
	Perempuan	118

Jumlah Pemilih Pemula	1.291
Jumlah Pemilih Disabilitas	27
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
1	1	2	0	2	0	1	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
1				0			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 4.500.000.000,-

Yang Disetujui

Rp 4.500.000.000,-

Ketepatan Waktu

tepat

Keterlambatan Waktu

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
14.134	13.798	474	516	211	118	14.819	14.432	29.136	115	25	84,90%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	7

Pemungutan Suara Ulang

Rekomendasi Panwas	Putusan MK
2	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	2
Penggunaan Fasilitas Negara	2
Mobilisasi PNS	5
Kampanye Jahat (Hitam)	4
Politik Uang	5
Kampanye Masa Tenang	4

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			3	0	30	8	81	0	13	0



Pencalonan (Tahapan) 1

SENGKETA

Hasil 1

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 3

Pelanggaran Pidana 13

Pelanggaran Etik 2

Pelanggaran Hukum Lainnya 1

PILKADA DI PAPUA BARAT

Pada Pilkada serentak tahun 2017, di Provinsi Papua Barat diselenggarakan pemilihan gubernur satu pemilihan walikota di Kota Sorong dan tiga pemilihan bupati di Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Sorong. Anggaran pengawasan yang diajukan untuk pemilihan Gubernur di Provinsi Papua Barat sebesar Rp 215 Miliar, namun yang disetujui hanya sebesar Rp 87.666.135.000,00. Sedangkan untuk pemilihan Bupati/Walikota, di Kota Sorong anggaran pengawasan yang diajukan adalah sebesar Rp 8 Miliar dan yang disetujui juga sebesar Rp 8 Miliar. Di Kabupaten Tambrauw, anggaran pengawasan yang disetujui sama dengan anggaran yang diajukan, yaitu sebesar Rp 10.724.450.000,00. Demikian juga dengan apa yang terjadi di Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Sorong, anggaran pengawasan yang disetujui sama dengan anggaran pengawasan yang diajukan yaitu sebesar Rp 8 Miliar untuk Kabupaten Maybrat dan Rp 12.844.390.000,00 untuk Kabupaten Sorong. Diantara kelima pelaksanaan Pilkada tersebut, hanya di Kabupaten Sorong pencairan anggaran pengawasan tidak dicairkan tepat waktu. Terdapat kekurangan sejumlah Rp 2.844.390.000,00 pada pencairan pertama anggaran pengawasan di Kabupaten ini.

Berkaitan dengan jumlah personel pengawas pemilu, dalam pemilihan Gubernur di Provinsi Papua Barat, secara keseluruhan terdapat 3827 pengawas dimana 3426 diantaranya adalah laki-laki dan 401 sisanya perempuan. Sedangkan pada tingkat pemilihan Bupati/Walikota, di Kota Sorong terdapat 494 orang pengawas, dengan laki-laki sebanyak 312 dan perempuan sebanyak 182. Di Tambrauw terdapat 270 orang pengawas, dengan laki-laki sebanyak 216 dan perempuan 54. Di Maybrat terdapat 223 orang pengawas, dengan laki-laki sebanyak 173 dan perempuan sebanyak 50 orang. Di Sorong terdapat 489 orang pengawas, dengan laki-laki sebanyak 371 dan perempuan sebanyak 118.

Hasil Pengawasan dalam pemilihan Gubernur provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa tidak terdapat laporan maupun temuan terkait dugaan pelanggaran dalam tahapan kampanye. Namun, pada tahapan pemungutan suara ditemukan adanya satu dugaan pelanggaran. Berdasarkan pada dugaan pelanggaran tersebut, hasil pengawasan pada pemilihan Gubernur Papua Barat menghasilkan dua pelanggaran administrasi dan enam pelanggaran pidana. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, di Kota Sorong tidak ditemukan adanya laporan ataupun temuan terkait dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye dan tahapan pemungutan suara. Namun di daerah ini terdapat dua kasus sengketa pencalonan. Berdasarkan pada proses penindakan atas sengketa tersebut, dihasilkan satu pelanggaran pidana yang terjadi di Kota Sorong. Sementara itu, di Tambrauw hasil pengawasan menghasilkan adanya dua pelanggaran administrasi dan dua pelanggaran pidana. Sedangkan di Maybrat, terdapat masing-masing satu kasus dugaan praktik politik uang, dugaan pelanggaran pada tahapan pemungutan suara, dan satu kasus sengketa hasil pemilu. Kabupaten ini bahkan menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Papua Barat yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Terakhir, di Kabupaten Sorong, tidak ditemukan baik dugaan pelanggaran maupun gugatan terkait tahapan pemilu. Namun, di kabupaten ini terdapat 2 sengketa hasil pemilu. Dari proses penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut tercatat terdapat dua pelanggaran administrasi, satu pelanggaran pidana, dan satu pelanggaran hukum lainnya.



PROVINSI PAPUA BARAT

Papua Barat



DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	365.278
	Perempuan	336.846
DPTb	Laki-laki	9.548
	Perempuan	9.933
DPPh	Laki-laki	318
	Perempuan	215

Jumlah Pemilih Pemula	19.970
Jumlah Pemilih Disabilitas	194
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
3	1	2	0	3	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				1			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 215.229.860.000,-

Yang Disetujui

Rp 87.666.135.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
262.521	248.714	9.038	8.861	312	209	271.871	257.784	521.258	8.397	182	74,70%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	1

Pemungutan Suara Ulang

Rekomendasi Panwas	Putusan MK
1	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
3332	3	0	34	2	585	0	1.821	0	983	399



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 2

Pelanggaran Pidana 6

Pelanggaran Etik 0

Pelanggaran Hukum Lainnya 0



PROVINSI PAPUA BARAT

Kota Sorong



DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	80.881
	Perempuan	77.240
DPTb	Laki-laki	3.253
	Perempuan	3.461
DPPh	Laki-laki	94
	Perempuan	91

Jumlah Pemilih Pemula	5.259
Jumlah Pemilih Disabilitas	24
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	2	0	2	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
2				2			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 8.000.000.000,-

Yang Disetujui

Rp 8.000.000.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

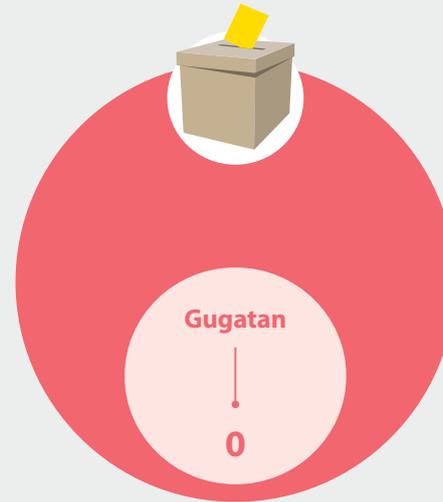
DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
46.758	46.830	3.253	3.461	94	91	50.105	50.382	95.519	4.968	24	66,50%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
	0	0	2	1	22	8	28	13	260	160



Pencalonan (Tahapan)	2
SENGKETA	
Hasil	0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	0	Pelanggaran Pidana	1	Pelanggaran Etik	0	Pelanggaran Hukum Lainnya	0
--------------------------	---	--------------------	---	------------------	---	---------------------------	---



PROVINSI PAPUA BARAT

Kabupaten Tambrauw



DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	13.357
	Perempuan	11.641
DPTb	Laki-laki	20
	Perempuan	9
DPPh	Laki-laki	3
	Perempuan	3

Jumlah Pemilih Pemula	784
Jumlah Pemilih Disabilitas	0
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
1	0	1	0	1	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				1			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 10.724.450.000,-

Yang Disetujui

Rp 10.724.450.000,-

Ketepatan Waktu

tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
13.061	11.302	20	9	3	3	13.084	11.314	24.241	157	0	98,50%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
	0	0	2	1	77	9	137	44	0	0



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 2

Pelanggaran Pidana 2

Pelanggaran Etik 0

Pelanggaran Hukum Lainnya 0



PROVINSI PAPUA BARAT

Kabupaten Maybrat



DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	14.607
	Perempuan	14.307
DPTb	Laki-laki	0
	Perempuan	0
DPPh	Laki-laki	0
	Perempuan	0

Jumlah Pemilih Pemula	17
Jumlah Pemilih Disabilitas	0
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	2	0	2	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				1			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 8.000.000.000,-

Yang Disetujui

Rp 8.000.000.000,-

Ketepatan Waktu

tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
14.607	14.307	0	0	0	0	14.607	14.307	28.823	91	0	100%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	1

Pemungutan Suara Ulang	
Rekomendasi Panwas	Putusan MK
0	1

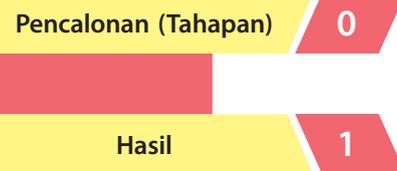


KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	1
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
	0	0	3	0	63	5	107	45	0	0



PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 1

Pelanggaran Pidana 0

Pelanggaran Etik 0

Pelanggaran Hukum Lainnya 0



PROVINSI PAPUA BARAT

Kabupaten Sorong



DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	46.179
	Perempuan	39.720
DPTb	Laki-laki	1.646
	Perempuan	1.622
DPPh	Laki-laki	58
	Perempuan	30

Jumlah Pemilih Pemula	2.907
Jumlah Pemilih Disabilitas	5
Jumlah Pemilih TMS	10.754



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	2	0	2	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				0			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 12.844.390.000,-

Yang Disetujui

Rp 12.844.390.000,-

Ketepatan Waktu

0

Keterlambatan Waktu

terlambat
(kurang Rp. 2.844.390.000)

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
27862	25536	1531	1504	55	24	29.448	27.058	55.648	858	4	66,40%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
	0	0	2	1	73	17	184	63	112	37



Pencalonan (Tahapan)	0
SENGKETA	
Hasil	2

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	2	Pelanggaran Pidana	1	Pelanggaran Etik	0	Pelanggaran Hukum Lainnya	1
--------------------------	---	--------------------	---	------------------	---	---------------------------	---

